

**IMPLEMENTASI KEBIJAKANSWASEMBAHADADAGING SAPI
DI LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017
(Studi pada Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram)**

Skripsi

**Oleh:
AGUNG RAHMAT S**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SWASEMBADA DAGING SAPI DI LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017

(Studi pada Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram)

Oleh:

AGUNG RAHMAT S

Daging sapi merupakan komoditas pangan dan memberikan kontribusi terhadap perbaikan gizi masyarakat. Namun, ketersediaan daging sapi tidak mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dari 6,42 kg/kap/tahun menjadi 6,45 kg/kap/tahun. Hal ini menjadikan harga daging sapi meningkat. Sehingga pemerintah mengadakan kebijakan swasembada daging sapi untuk menstabilkan harga daging sapi yang mahal dan mensejahterakan peternak sapi. Penelitian memiliki dua tujuan, yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan swasembada daging sapi dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan swasembada daging sapi di Lampung Tengah studi pada Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Proses analisis data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Implementasi Kebijakan Program Penggemukan Sapi di Desa Qurnia Mataram dapat disimpulkan berikut ini: Komunikasi yaitu gencarnya sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan Dinas Peternakan terhadap peternak sapi dan dibantu Insminator. Sumber Daya yaitu minimnya pengetahuan dimiliki oleh para peternak dibidang teknis perbaikan alat kerja dan dinas peternakan memerikan fasilitas penyuntikan insminasi buatan gratis untuk peternak sapi. Disposisi yaitu Dinas Peternakan rutin melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sesuai dengan jadwal. Birokrasi yaitu SOP dan fragmentasi yang sudah berjalan dengan baik. 2. Faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan swasembada daging sapi di Lampung Tengah studi pada Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram: ketersediaan pakan, ketersediaan bibit, permasalahan teknis budi daya dan sosio-budaya, tingginya pemotongan betina produktif, ketimpangan distribusi pasokan sapi dan daging sapi. Saran yang diberikan penulis adalah: 1. Manajemen Ketersediaan Pakan. 2. Pengembangan Usaha Pembibitan Sapi. 3. Pengendalian Pemotongan Sapi Betina Produktif.

Kata Kunci: Kebijakan, Swasembada, peternak

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SWEET BEAUTY POLICY IN CENTRAL LAMPUNG 2017

(Study In Qurnia Village Mataram Kecamatan Seputih Mataram)

By:

AGUNG RAHMAT S

Beef is a food commodity and contributes to improving community nutrition. However, the availability of beef does not meet the food needs of the people of Central Lampung Regency from 6.42 kg / capita / year to 6.45 kg / capita / year. This makes the price of beef increase. So that the government implements a policy of self-sufficiency in beef to stabilize the price of beef which is expensive and makes cattle breeders more attractive. The study has two objectives, namely to determine the implementation of beef self-sufficiency policies and to determine the inhibiting factors for implementing beef self-sufficiency policies in Central Lampung, a study in Qurnia Mataram Village, Seputih Mataram District. This study used descriptive qualitative analysis techniques. The process of data analysis is done by means of interviews, documentation and observation.

The results of the study show that 1. Implementation of the Policy for Cattle Fattening Program in Qurnia Mataram Village can be summarized as follows: Communication is the incessant socialization and guidance conducted by Livestock Farmers towards cattle farmers and assisted by Insminator. Resources that are generally owned by farmers in the field of technicians for work tool and livestock service repairs describe free artificial insinatory injection facilities for cattle breeders. The disposition, namely the Livestock Service Office routinely monitors and evaluates activities in accordance with the schedule. . 2. Inhibiting factors for implementation of beef self-sufficiency policies in Central Lampung study in Qurnia Mataram Village, Seputih Mataram District: availability of feed, availability of seeds, cultivation and socio-cultural technical problems, high cutting of productive females, unequal distribution of beef and beef supply . Suggestions given by the author are: 1. Feed Availability Management. 2. Cow Breeding Business Development. 3. Control of Cutting Productive Females.

Keywords: Policy, Self-Sufficiency, breeders

**IMPLEMENTASI KEBIJAKANSWASEMBADADAGING SAPI
DI LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017
(Studi pada Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram)**

**Oleh:
AGUNG RAHMAT S**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
SWASEMBADA DAGING SAPI DI
LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 (Studi
pada Desa Qurnia Mataram Kecamatan
Seputih Mataram)**

Nama Mahasiswa : **Agung Rahmat S.**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1346021002

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Dr. Feni Rosalia, M.Si.

NIP. 19640219 199403 2 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

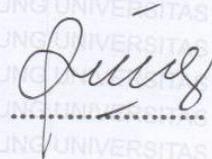
Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P

NIP. 19611218 198902 1 001

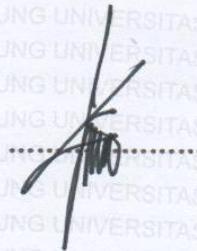
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Feni Rosalia, M.Si.



Penguji : Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 April 2019

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 30 April 2019

Yang Membuat Pernyataan



**Agung Rahmat S.
NPM. 1346021002**

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Agung Rahmat Safitri, lahir di Lampung Tengah pada tanggal 3 Maret 1995. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Drs. Wajiono, S.Pd dan Ibu Rukensi. Pendidikan formal yang telah ditempuh yakni pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Seputih Mataram diselesaikan tahun 2007.

Pendidikan selanjutnya yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Seputih Mataram diselesaikan pada tahun 2010. Kemudian penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seputih Mataram diselesaikan tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. Tertulis dan tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HMJ Ilmu Pemerintahan) pada periode 2013/2014. Pada tahun 2016, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Payung Rejo, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah selama 60 hari.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Sesungguhnya "Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. (QS Ar-Ra'd : 11)

Kesuksesan itu bukanlah suatu hal yang dapat siap dalam semalam. Begitupun ketika Anda memikirkan ingin menjadi apa dan seperti siapa. Maka bersiaplah untuk menyiapkan diri dari sekarang dalam menyambut sebuah kesempatan. Karena kesuksesan datang disaat Kesempatan dan Persiapan berjumpa.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan Segala Kerendahan Dan
Ketulusan Hati Kupersembahkan Karya Kecil Dan Sederhana Ini
Kepada:*

Kedua Orangtua ku **Bapak Drs. Wajiono S.Pd dan Ibu Rukensi (Alm)** yang telah memberikan cinta dan kasihnya, memberikan semangat dan motivasinya. Yang telah mendidik Agung sampai sekarang dengan penuh kesabaran dan selalu mendoakan yang terbaik buat Agung.

*Kedua Adik ku Tersayang
Dian aji Rukmasyah dan Elisa Aji Aryani*

Sahabat-sahabat tercinta dan teman-teman seperjuangan

Para Pendidik Tanpa Tanda Jasa Yang Kuhormati

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

“Alhamdulillahirobil” alamin, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Swasembada Daging Sapi di Lampung Tengah Tahun 2017 (Studi Pada Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (SIP) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Dalam proses skripsi ini, penulis masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk penembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penulis berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini, baik bantuan moril, materi, berupa petunjuk, bimbingan, nasehat dan saran yang bermanfaat bagi penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku Pembimbing. Terima kasih Bu atas saran, nasihat, bimbingan selama proses pengerjaan skripsi, waktu, serta kesabaran

yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis benar-benar berterima kasih dan merasa terbantu sekali dengan proses bimbingan.

4. Bapak Drs. Denden Kurnia D, M.Si selaku Dosen Pembahas. Terima kasih Pak atas arahan, saran, kritik, masukan, nasihat serta waktu yang telah banyak membantu penulis. Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini juga berkat bantuan dari Bapak.
5. Teristimewa untuk kedua orangtuaku ayahanda Drs. Wajino, S.Pd dan ibunda Rukensi (Alm), yang telah memberikan sealalu perhatian, kasih sayang, doa, semangat, dan dukunganyang di berikan selama ini. Terima kasih atas segalanya, semoga agung bisa membanggakan dan menjadi anak yang berbakti untuk bapak dan ibu (alm) .
6. Teristimewa untuk Ibu Soryani, terima Kasih untuk segalanya yang telah memberikan dukukang, doa, semangat dan kasih sayang.
7. Adik-adikku Dian Aji Rukmansyah dan elisa Aji Aryani, terima kasih untuk kejailan dan omelan dan perhatianmu terhadapku, sehingga aku bisa bangkit dari keluh kesah yang di hadapi.
8. Nenekku Sandep (alm) yang dulu selalu mengingatkan dan membangkitkan semangatku dalam mengelarkan kuliah di Unila. Terima kasih nek sudah sangat perhatian pada cucumu ini agar cepat wisuda, atas doa dan semangatmu, sebelum engkau kembali pengkuan yang maha kuasa.
9. Sodara-sodaraku dan adik-adik sepupu Suharni, Dea, Tama, Rangga terima kasih banyak yang selalu membangun semangatku dan mengingatkan agar segera selesai.
10. Terima kasih banyak untuk teman dekat evit selama ini memberikan masukan, dukungan, doa dan perhatian agar mencapai gelarku.
11. Sahabatku semasa SMA tatra, andang, ari, ifan. Terima kasih sudah menjadi teman dan sahabat dan memberikan semangat.
12. Teman sekaligus Sahabat-sahabat semasa kuliah toni, evan, rendra, bima, ijal, rifki, ibnu terima kasih banyak atas dukungannya dan arahannya.
13. Teman-teman seperjuangan alam, dani, alex, andi, agus, toto, ridho, iqbal, kalim, dani s terima kasih banyak.

14. Teman KKN ku dini, ratna, irsyad, terima kasih untuk semangat dan dukungannya.
15. Sahabat-sahabatku mahasiswa-mahasiswi jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2013, terima kasih atas dukungan dan kehadirannya. Semangat teman-teman kita pasti bisa menggapai cita-cita dan mimpi kita.
16. Pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Tengah yang sudah banyak membantu dalam kelancaran penelitian ini. Terkhusus buat bapak Pardi selaku Kepala Seksi Budidaya dan pembibitan, yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam proses turlap. Terima kasih atas saran, motivasi, dan setiap pengalaman yang Bapak bagikan selama saya melakukan penelitian di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Tengah.

Bandar Lampung, 30 April 2019

Penulis

Agung Rahmat S.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Manfaat Penelitian | 12 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik | 14 |
| 1. Pengertian Kebijakan Publik | 14 |
| 2. Jenis Kebijakan Publik | 16 |
| 3. Tahap-Tahap Kebijakan | 17 |
| B. Implementasi Kebijakan Publik | 20 |
| 1. Pengertian Implementasi | 20 |
| 2. Model Implementasi Kebijakan dalam Perspektif George Edwards III..... | 22 |
| C. Swasembada Sapi..... | 30 |
| D. Kesejahteraan Sosial | 31 |
| E. Kerangka Pikir | 32 |
| III. METODE PENELITIAN | |
| A. Tipe Penelitian | 37 |
| B. Fokus Penelitian..... | 37 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 40 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 40 |
| 1. Data Primer | 40 |
| 2. Data Sekunder | 41 |
| E. Informan..... | 42 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 42 |
| 1. Wawancara (<i>interview</i>) | 42 |
| 2. Dokumentasi..... | 45 |
| 3. Observasi..... | 46 |
| G. Teknik Pengolahan Data | 47 |
| H. Teknik Analisis Data..... | 47 |
| 1. Reduksi data | 48 |
| 2. Penyajian Data..... | 48 |
| 3. Penarikan Kesimpulan..... | 49 |
| I. Teknik Keabsahan Data | 50 |

| | |
|---|----|
| IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | |
| A. Desa Qurnia Mataram | 54 |
| 1. Situasi dan Kondisi Desa Kejadian | 54 |
| 2. Penggunaan Lahan | 55 |
| 3. Keadaan Penduduk..... | 56 |
| 4. Sarana dan Prasarana..... | 59 |
| 5. Potensi Desa | 60 |
| 6. Wilayah Peternakan dan Penggemukan Sapi..... | 60 |
| 7. Kegiatan swasembada daging di Lampung Tengah | 61 |
| V. HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Hasil Penelitian | 63 |
| 1. Implementasi Kebijakan Swasembada daging di Lampung Tengah | 63 |
| 2. Faktor-Faktor Penghambat..... | 74 |
| B. Pembahasan | 75 |
| 1. Implementasi kebijakan swasembada daging sapi di Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram..... | 75 |
| 2. Faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan swasembada daging..... | 83 |
| a. Ketersediaan Pakan | 85 |
| b. Ketersediaan Bibit..... | 86 |
| c. Permasalahan Teknis Budi Dayadan Sosio- Budaya | 87 |
| d. Tingginya Pematangan Betina Produktif..... | 88 |
| e. Ketimpangan Distribusi Pasokan Sapi dan Daging Sapi | 89 |
| VI. KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | 91 |
| B. Saran..... | 94 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan Menurut Wilayah di Provinsi Lampung | 2 |
| Tabel 2. Jumlah Konsumsi Daging dan Populasi Penduduk Lampung.... | 3 |
| Tabel 3. Populasi Ternak Sapi Di Kabupaten Lampung Tengah | 5 |
| Tabel 4. Nama Desa di Kecamatan Seputih Mataram..... | 9 |
| Tabel 5. Informan yang Diperoleh Peneliti | 41 |
| Tabel 6. Dokumen terkait Implementasi ProgramSwasembada Sapi..... | 46 |
| Tabel 7. Objek Penelitian Program Sausembada di Lampung Tengah | 46 |
| Tabel 8. Contoh Tabel Triangulasi Implementasi Program Swasembada daging Sapi di Provinsi Lampung | 51 |
| Tabel 9. Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaanya di Desa Qurnia Mataram Tahun 2017..... | 55 |
| Tabel 10. Distribusi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia di Desa Qurnia Mataram Tahun 2017 | 56 |
| Tabel 11. Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Qurnia Mataram Tahun 2017 | 57 |
| Tabel 12. Keadaan Penduduk Desa Qurnia Mataram Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2017 | 58 |
| Tabel 13. Sarana dan Prasarana di DesaQurnia Mataram Tahun 2017 | 59 |
| Tabel 14. Data Peternakan di Desa Qurnia Mataram | 62 |
| Tabel 15. Data Perternakan di Desa Qurnia Mataram..... | 76 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|----------------------------------|----|
| Gambar 1. Kerangka Pikir..... | 36 |
| Gambar 2. Bagan Interaktif | 50 |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadaan masyarakat Indonesia pada saat ini dirasakan masih memprihatinkan dan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak (kemensos.go.id/berita diakses pada pukul 13.00 WIB 1 September 2017). Sejatinya Indonesia terletak yang dilintas garis khatulistiwa termasuk ke dalam wilayah beriklim tropis. Wilayah Indonesia yang beriklim tropis, memiliki curah hujan yang tinggi dan menyebabkan tanah menjadi subur. Tanah yang subur cocok untuk tumbuhnya berbagai jenis tanaman penghasil bahan makanan dan bahan pakan ternak, ataupun rerumputan sebagai bahan pakan ternak.

Sebagai negara agraris, sebagian besar bermata pencarian sebagai petani. Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, hampir separuh dari total penduduk miskin Indonesia adalah petani. Artinya, petani sebagai penghuni terbesar negeri ini justru berada di tingkat terbawah nilai kesejahteraannya (sumber: [Error! Hyperlink reference not valid.](#)diakses pada pukul 14.00WIB 1 September 2017). Salah satu jenis petani adalah petani ternak (peternak sapi).

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah penghasil dan pemasok daging di Indonesia. Jumlah peternak terbanyak berada di Kabupaten

Lampung Tengah, berikut tabel mengenai jumlah rumah tangga usaha peternakan menurut wilayah di Provinsi Lampung:

Tabel 1. Jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan Menurut Wilayah di Provinsi Lampung

| No | Kabupaten/Kota | Peternak Sapi |
|---------------|---------------------|----------------|
| 1 | Lampung Tengah | 75,391 |
| 2 | Lampung Timur | 44,250 |
| 3 | Lampung Selatan | 32,635 |
| 4 | Way Kanan | 11,413 |
| 5 | Lampung Utara | 10,728 |
| 6 | Pesawaran | 7,491 |
| 7 | Tulang Bawang | 7,361 |
| 8 | Lampung Barat | 6,383 |
| 9 | Tulang Bawang Barat | 6,356 |
| 10 | Pringsewu | 5,456 |
| 11 | Mesuji | 2,558 |
| 12 | Tanggamus | 1,973 |
| 13 | Metro | 1,661 |
| 14 | Bandar Lampung | 621 |
| Jumlah | | 214,277 |

Sumber: Laporan Sensus Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung 2017

Berdasarkan dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga usaha peternakan yang terbanyak yaitu berapa di Lampung Tengah. Oleh karena itu, seiring meningkatnya perkembangan jumlah penduduk dan perbaikan taraf hidup penduduk di Lampung, maka permintaan produk-produk untuk pemenuhan gizi pun semakin meningkat, begitu pula dengan permintaan akan bahan pangan seperti permintaan protein hewani. Komoditas daging, telur dan susu merupakan komoditas pangan yang berprotein tinggi memiliki harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan komoditas pangan lainnya.

Salah satu produk peternakan yang meningkat setiap tahun permintaannya yaitu daging sapi. Daging sapi merupakan salah satu komoditas pangan yang

selama ini memberikan kontribusi terhadap perbaikan gizi masyarakat, khususnya protein hewani yang sangat dibutuhkan oleh pembangunan manusia. Daging sapi merupakan sumber protein hewani yang memiliki kandungan protein paling tinggi dibandingkan dari jenis lainnya. Saat ini kebutuhan daging sapi untuk konsumsi penduduk Lampung dirasakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Lampung semakin meningkat setiap tahunnya sesuai dengan kenaikan jumlah penduduk.

Kebutuhan akan daging sapi yang meningkat, tidak berbanding lurus dengan ketersediaan daging sapi, di mana setiap tahun pengadaan daging sapi mengalami penurunan ketersediaan mencapai 16,55 persen, hal ini antara lain karena pengeluaran ternak guna mencukupi tingginya kebutuhan sapi di luar Kabupaten Lampung Tengah dan Provinsi Lampung, peningkatan pemotongan sapi untuk acara keagamaan serta peningkatan pemotongan sapi lokal akibat adanya pembatasan import sapi potong. (sumber: www.lampost.com, diakses pada pukul 13.25 WIB 2 September 2017).

Hal ini yang mengakibatkan kelangkaan persediaan daging yang menimbulkan harga daging menjadi tinggi. Berikut adalah tabel jumlah konsumsi daging dan populasi penduduk dari tahun ke tahun:

Tabel 2. Jumlah Konsumsi Daging dan Populasi Penduduk Lampung

| No | Tahun | Konsumsi Daging (Kg/Kap/Th) | Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa) |
|----|-------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2016 | 6,42 | 1.239.096 |
| 2 | 2017 | 6,45 | 1.214.720 |

Sumber: *Buku Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Tengah Tahun 2017*

Berdasarkan dari tabel di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah konsumsinya dari tahun 2016-2017. Konsumsi daging sebagai sumber protein perkapita pertahun di Lampung Tengah yaitu sebesar 6,45 kg/kepala keluarga/tahun. Rendahnya tingkat konsumsi daging ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena harga daging yang semakin mahal. Harga daging yang mahal ini salah satunya dipicu oleh kurangnya jumlah ternak penghasil daging di dalam negeri dan masuknya daging dari luar negeri. Jumlah konsumsi daging sapi masyarakat Indonesia semakin rendah dan di perparah dengan meningkatnya harga daging sapi di pasaran pada tahun 2017.

“Harga daging daerah-daerah lain di Provinsi Lampung pada Januari 2017 yang semula Rp 100.000-110.000 perkilogram meningkat menjadi Rp 120.000 per kilogram. Kenaikan harga daging sapi dipicu oleh naiknya permintaan daging sapi serta berkurangnya stok sapi atau daging sapi dipasaran. Berkurangnya ketersediaan sapi atau daging sapi disebabkan oleh dibatasinya impor sapi bakalan dan daging sapi guna meningkatkan daya saing sapi atau daging sapi lokal. Pembatasan impor tidak diikuti oleh industrialisasi peternakan sapi lokal sehingga ketersediaan sapi dipeternak semakin berkurang” (Pra Riset Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung tengah, bapak Pardi pukul 10.00WIB 5 September 2017).

Faktor lain yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan sapi atau daging sapi di pasaran juga terkait dengan karakteristik peternakan. Peternak sapi lokal umumnya berusaha dalam skala kecil, bukan usaha komersial tetapi sebagai simpanan atau tabungan masyarakat guna mengantisipasi kebutuhan dimasa yang akan datang, serta lokasi peternakan yang jauh dan sulit dijangkau. Naiknya harga daging sapi dipasaran jika hanya dipicu oleh masalah ketersediaan sapi atau daging sapi seharusnya dapat terselesaikan

dengan menambah ketersediaan melalui impor. (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Tengah Prariset pada pukul 10.20 WIB 5 September 2017). Berikut peneliti sampaikan dalam bentuk tabel:

Tabel 3. Populasi Ternak Sapi Di Kabupaten Lampung Tengah

| No | Tahun | Poulasi |
|----|-------|---------|
| 1 | 2014 | 16.741 |
| 2 | 2015 | 18.116 |
| 3 | 2016 | 19.497 |

Sumber : Dinas Peternakan Lampung Tengah (2017)

Mengatasi terjadinya kekurangan persediaan daging, maka pemerintah mengambil tindakan dengan melakukan impor sapi dari Australia. Permintaan daging sapi yang semakin besar tersebut tidak bisa diimbangi oleh ketersediaan produksi daging sapi lokal sehingga tidak terjadi keseimbangan pasar. Kenyatannya hasilnya tidak seperti harapan, di mana kebutuhan daging nasional lebih banyak dicukupi oleh impor, tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi ternak lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak mampu mengoptimalkan usaha peternakan sapi lokal dan pada akhirnya semakin tergantung pada impor daging maupun bakalan sapi untuk memenuhi permintaan akan protein hewani nasional.

Kondisi semakin meningkatnya impor daging sapi yang juga termasuk jeroan sapi akan membuat perkembangan usaha peternakan rakyat menjadi terdesak, sehingga perlu adanya proteksi dari pemerintah untuk mengurangi besarnya impor. Pemerintah membuat kebijakan untuk membatasi kuota impor baik bakalan maupun daging sapi untuk meningkatkan sumber daya sapi lokal yang selama ini tidak mampu bersaing, yaitu dengan menetapkan

volume impor sebesar 500.000 ekor/tahun sejak 2011 hingga semakin menipis menjadi 80.000 ekor untuk periode tahun 2013. Pemerintah juga tidak ingin devisa negara semakin terkuras dengan semakin tingginya nilai impor untuk bakalan maupun daging sapi dan juga bila terus menerus melakukan impor sapi maka kesejahteraan peternak sapi pun akan terancam.

Penetapan kebijakan pembatasan kuota impor sapi memang menjadi angin segar bagi kelangsungan peternak sapi lokal. Keberlangsungan usaha sapi lokal yang tadinya tidak mampu bersaing dengan sapi impor diharapkan bisa membaik dengan adanya kebijakan ini (Sumber: ditjennak.pertanian.go.id, diakses pada pukul 15.30 WIB tanggal 2 September 2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/2014 tentang Pedoman Umum Swasembada Daging Sapi 2014, bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri perlu upaya pencapaian swasembada daging sapi dan diperlukan suatu swasembada daging sapi. Pemerintah membuat suatu usaha peningkatan pengadaan daging sapi baik dalam jumlah maupun kualitasnya adalah dengan swasembada sapi. Swasembada sapi adalah sapi jantan yang dipelihara dalam kandang tertentu, tidak dipekerjakan tetapi hanya diberi makan dengan nilai nutrisi yang optimal untuk menaikkan berat badan. Sapi dipelihara hingga mencapai berat yang diinginkan tempat pemotongan hewan.

Swasembada sapi ini juga merupakan suatu program pemerintah melalui Dinas Peternakan memberikan bantuan pakan untuk ternak dan melakukan pembinaan peternak sapi disuatu daerah dengan membentuk kelompok-

kelompok peternak sapi yang diharapkan menjadi cikal bakal usaha kecil mikro dan menengah dibidang pertanian dan peternakan. (sumber: prariset di Dinas Peternakan Lampung Tengah pada pukul 19.00 WIB tanggal 25 September 2017).

Swasembada sapi potong ini bertujuan menghasilkan keuntungan dan meningkatkan produksi daging dalam negeri agar tidak terlalu ketergantungan lagi untuk mengimpor sapi dari luar negeri sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena produksi daging terpenuhi. Berkembangnya usaha kelompok, meningkatnya pendapatan dan tercapaian kesejahteraan kelompok sasaran dan masyarakat pada umumnya, supaya suatu usaha memperoleh keuntungan yang diharapkan, perencanaan harus dibuat dengan pertimbangan yang matang.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh peternak tradisional dalam peternakan sapi adalah produktivitas ternak sapi yang rendah. Salah satu faktor penyebab rendahnya produktivitas adalah pemilihan pakan ternak yang tidak sesuai dengan sistem swasembada sapi modern. Para petani tradisional terbiasa menggunakan rumput dan hijau-hijauan sebagai makanan pokok untuk ternak sapi. Sedangkan untuk swasembada sapi agar lebih intensif dan produktifitas menjadi tinggi maka makanan dengan kandungan protein dan karbohidrat yang tinggi sangat diperlukan. (Pra Riset Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Tengah, Pardi pukul 10.00.WIB 5 September 2017).

Swasembada sapi ini dilakukan tak hanya dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para peternak saja akan tetapi untuk kesejahteraan masyarakat Lampung Tengah itu sendiri. Semuanya berjalan dengan baik maka kebutuhan daging di Lampung Tengah bisa terpenuhi sehingga tidak akan terjadinya kelangkaan produksi sapi yang menimbulkan susahnyanya mendapatkan daging dan juga harga daging menjadi tinggi. Lampung Tengah merupakan daerah penghasil daging sapi terbanyak di banding daerah lain, dan di Provinsi Lampung sendiri daerah yang banyak melakukan swasembada sapi berada di Lampung Tengah karena Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi peternakan yang cukup besar $\pm 35\%$ populasi sapi di Provinsi Lampung yang kurang lebih 70% usaha swasembada sapi berasal dari Kabupaten Lampung Tengah.

Sehingga dengan kondisi tersebut sangat wajar kalau Kabupaten Lampung Tengah dikenal sebagai Lumbung Ternak Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Tengah memiliki 28 Kecamatan dan 297 desa/kelurahan. Masing-masing desa memiliki kelompok tani (POKTAN) yang tergabung ke dalam Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) yang ada di masing-masing kecamatan khususnya Kecamatan Seputih Mataram. Kecamatan Seputih Mataram memiliki 12 desa yaitu

Tabel 4. Nama Desa dan Jumlah Populasi Sapi

| No | Desa | Jumlah |
|----|----------------------|--------|
| 1 | Banjar Agung Mataram | - |
| 2 | Wirata Agung Mataram | 15 |
| 3 | Varia Agung | 71 |
| 4 | Utama Jaya Mataram | 22 |
| 5 | Qurnia Mataram | 238 |
| 6 | Dharma Agung Mataram | 1 |
| 7 | Trimulyo Mataram | 42 |
| 8 | Sumber Agung Mataram | 139 |
| 9 | Subing Karya | 5 |
| 10 | Rejosari Mataram | 148 |
| 11 | Fajar mataram | 189 |
| 12 | Bumi Setia | 20 |

Sumber : Pra Riset Kecamatan Seputih Mataram 5 September 2017

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa desa Qurnia Mataram banyak melakukan swasembada sapi dikarenakan Desa Qurnia Mataram memiliki luas tanah pekarangan yang cocok untuk dilakukan swasembada sapi. Lahan di Desa Qurnia Mataram terdapat lahan pekarangan yang cukup luas yaitu 400,15 ha. Luasnya lahan pekarangan ini menunjukkan bahwa Desa Qurnia Mataram merupakan daerah yang baik untuk usaha swasembada sapi karena banyaknya luas lahan pekarangan yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat pembuatan kandang ternak sapi dalam usaha swasembada sapi. Selain itu lahan pekarangan ini juga dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman hijauan pakan ternak sapi.

Pada kenyataannya terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam swasembada sapi yang dilaksanakan, antara lain operasionalisasi program yang dilaksanakan. Kendala yang terkadang dialami oleh para peternak adalah susahny mendapatkan bahan pakan ternak, mereka harus

mengeluarkan sedikit modal untuk membeli pakan dan terkadang juga ketersediaan rumput di lingkungan mereka minim sehingga para peternak harus mengganti dengan membeli bahan pakan buatan.

Kebanyakan para peternak merupakan masyarakat yang kurang mampu sehingga dengan membeli bahan pakan tersebut akan menjadi sedikit beban bagi mereka, karena itu dibutuhkan upaya yang maksimal dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Tengah untuk bisa memberikan pengawasan dan bantuan pakan, serta informasi yang jelas bagi seluruh masyarakat petani peternak diberbagai daerah. Sebab dengan adanya strategi pelaksanaan program yang jelas dan struktur organisai berjalan dengan baik serta disposisi dari aparat yang baik pula, diharapkan setiap masyarakat peternak dapat memahami bagaimana penerapan swasembada sapi ini dalam upaya meningkatkan kesejahteraan peternak. (Pra Riset di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Tengah pukul 10.00 WIB 5 September 2017).

Implementasi kebijakan yang ada dalam hal ini adalah Kebijakan Swasembada sapi yang pada dasarnya ditujukan untuk menyelesaikan persoalan di bidang peternakan. Keberhasilan atau kegagalan program ini sangat ditentukan oleh pelaksana program, apabila pelaksana program sudah mampu melaksanakannya dengan baik, diharapkan sasaran dari program ini akan dapat terakomodir, karena sebuah program dapat dikatakan baik bukan hanya dilihat dari bentuk program yang dikeluarkan, tetapi apakah program itu sudah mampu menjawab sesuai kebutuhan yang diperlukan, pelaksana

program yang baik dan mampu mengakomodir sasaran yang ada dalam hal ini peternak untuk dapat menjawab kebutuhan dan mewujudkan hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu, implementasi merupakan suatu tahapan yang penting dalam kebijakan publik.

Suatu kebijakan telah memiliki tujuan yang baik, namun dalam pengimplementasiannya terjadi kegagalan maka tujuan dari program tersebut tidak akan tercapai. Begitu juga dengan swasembada sapi ini, walaupun program ini memiliki tujuan yang baik, namun tidak diimplementasikan dengan baik maka program ini tidak akan berhasil mencapai tujuannya. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melihat lebih dekat bagaimana penerapan swasembada sapi di Kabupaten Lampung Tengah khususnya di desa Qurnia Mataram dalam upaya meningkatkan kesejahteraan peternak sapi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan swasembada daging sapi di Lampung Tengah studi pada Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram?
2. Apa faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan swasembada daging sapi di Lampung Tengah studi pada Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan swasembada daging sapi di Lampung Tengah studi pada Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan swasembada daging sapi di Lampung Tengah studi pada Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan peneliti, dan menambah penelitian/kajian yang berguna bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan publik dengan spesifik implementasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini mampu memberikan masukan-masukan bagi para *stakeholder* kebijakan, khususnya dalam pelaksanaan swasembada sapi di Lampung Tengah, serta dapat berguna bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Tengah dan Desa Qurnia Mataram sehingga menjadi umpan balik (*feed back*) dalam implementasi swasembada sapi

dan juga dapat menjadi acuan bagi organisasi-organisasi lain dalam mengimplementasikan program-program yang akan dilaksanakan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga bagaimana bentuk layanan itu. Dye dalam Agustino (2008: 7), mendefinisikan kebijakan publik merupakan upaya yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah.

Sedangkan menurut Islamy dalam Sulistio (2013: 3), kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau beorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan menurut Enderson dalam Agustino (2008: 7) yaitu serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah

tertentu. Istilah kebijakan publik lebih sering dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan pemerintah.

Menurut Sulistio (2013: 3), kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan oleh instansi publik (instansi atau badan-badan Pemerintah) bersama-sama dengan aktor elit politik dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan publik demi kepentingan seluruh masyarakat. Berdasarkan beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk kepentingan seluruh masyarakat, yang mampu mengakomodasi nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat, baik dilakukan atau tidak dilakukan.

Pemahaman tersebut sejalan dengan pendapat Islami menyatakan kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan demi kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan Negara tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk tujuan, sasaran dari program-program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan pengertian-pengertian kebijakan publik di atas, maka disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan adalah serangkaian tindakan pemerintah yang bersifat mengatur dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mempunyai tujuan tertentu, berorientasi

kepada kepentingan publik (masyarakat) dan bertujuan untuk mengatasi masalah, memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat.

2. Jenis Kebijakan Publik

Banyak pakar mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. James Anderson menyampaikan kategori tentang kebijakan publik tersebut sebagai berikut:

a. Kebijakan substansif versus kebijakan prosuderal

Kebijakan substansif yakni kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosuderal adalah bagaimana kebijakan substansif tersebut dapat dijalankan.

b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan re-distributif.

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelanggaran terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dimasyarakat.

c. Kebijakan material versus kebijakan simbolis

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumberdaya konkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

- d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*).

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan *privatgoods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Penelitian ini membahas mengenai suatu program dari pemerintah dimana pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat, oleh karena itu suatu program termasuk dalam kebijakan publik. Menurut Wahab (2008: 28), bahwa membahas tentang suatu program maka pada umumnya yang dimaksudkan ialah suatu lingkup kegiatan pemerintah yang relatif khusus dan cukup jelas batas-batasnya. Dalam konteks program itu sendiri biasanya akan mencakup serangkaian kegiatan yang menyangkut pengesahan pengorganisasian dan pengerahan atau penyediaan sumber-sumber daya yang diperlukan. Program-program atau sub-sub program dengan demikian dipandang sebagai sarana (instrumen) untuk mewujudkan berbagai tujuan-tujuan yang ingin di capai oleh pemerintah.

3. Tahap-Tahap Kebijakan

Menurut Winarno (2002: 35-37) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi

proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Merupakan tahap penempatan masalah pada agenda publik oleh para pejabat yang dipilih dan diangkat. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini, suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan

diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Penelitian Kebijakan atau Evaluasi

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah menarik dampak yang diinginkan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, peneliti akan memfokuskan penelitian ini di tahap implementasi karena sebaik apapun kebijakan bila tidak di implementasikan maka akan tidak bermanfaat. Dengan membuat kebijakan tersebut pemerintah harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak terhadap suatu kebijakan/program yang akan dirasakan oleh masyarakatnya. Karena implementasi akan menghasilkan suatu akibat dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap suatu keputusan kebijakan yang akan dicapai dalam tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, menurut Nugroho (2008: 432). Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012: 149), implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sejalan dengan kutipan di atas

maka menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2012: 147) bahwa implementasi adalah suatu yang dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Sementara itu, menurut Grindel dalam Winarno (2012: 147), juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*apolicy delivery system*”, di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik pernyataan-pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Sebab pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*public service*). Kebijakan yang baik tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dapat diimplementasikan.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. Berdasarkan beberapa pengertian di atas mengenai implementasi, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi biasanya menunjukkan seluruh upaya untuk melakukan perubahan melalui sistem baru dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan dalam suatu kebijakan atau program.

2. Model Implementasi Kebijakan Dalam Perspektif George Edwards III

Menurut Edward III dalam Agustino (2008: 149), studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration dan public policy*. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara

pembentukan kebijakan dan konsekuensi- konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka model implementasi kebijakan publik yang berperspektif *top down* dikembangkan oleh Edward III. Pendekatan yang dikemukakan oleh Edward III mempunyai empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi dan (4) Struktur Birokrasi.

Keempat variabel dalam model yang dibangun oleh Edward III tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain. Sementara itu, model yang dikemukakan Edwards III dalam Agustino (2008: 149) implementasi atau pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program/kebijakan. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut serta konsistensi informasi yang disampaikan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan.

Edward III dalam Winarno (2012: 178), persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Akan tetapi, banyak hambatan-hambatan yang menghadang transmisi komunikasi-komunikasi pelaksanaan dan hambatan-hambatan ini mungkin menghalangi pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran. Dengan demikian untuk kepentingan tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang intensif tentang kebijakan yang dimaksud. Sosialisasi dalam hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya melalui media cetak ataupun media elektronik.

Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

- a. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi atau pelaksanaan yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi pelaksanaan tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

- b. Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi pelaksanaan kebijakan atau program, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan program, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumberdaya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi pelaksana atau implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya adalah faktor penting untuk pelaksanaan program agar efektif, dimana tanpa sumber daya maka program atau kebijakan hanya sekedar kertas dokumen. Sedangkan menurut Winarno (2012: 184), Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk

melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif.

Dengan demikian, sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Tanpa sumber daya yang memadai, tentu implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Sumber daya sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi sekedar angan-angan ataupun dokumen di atas kertas semata. Edward III dalam Agustino (2008: 151) menyatakan bahwa hal ini meliputi empat komponen, yaitu :

a. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang seiring terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi

Informan dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut payuh terhadap hukum.

c. Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimana publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

d. Fasilitas, merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen aparat pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi pelaksana atau implementor dari program, dalam hal ini terutama adalah aparatur birokrasi. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan atau program, sedangkan apabila implementor atau pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi atau pelaksanaan program juga menjadi tidak efektif.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III dalam Agustino (2008: 152), adalah:

- a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b. Intensif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan

mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III dalam Nugroho (2008: 636), bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga Negara atau pemerintah.

Menurut Edward III dalam Agustino (2008: 153), dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik yaitu: melakukan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. Variabel-variabel kebijakan bersangkutan dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana yang meliputi baik organisasi formal maupun informal, sedangkan komunikasi antara organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan

pelaksanaannya mencakup antara hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan para pelaksana mengantarkan kita pada pemahaman mengenai orientasi dari mereka yang telah mengoperasionalkan program di lapangan.

Model implementasi inilah yang akan digunakan penulis dilapangan untuk menganalisis program penggemukan sapi dalam meningkatkan kesejahteraan Peternak Sapi di Provinsi Lampung. Alasan penulis menggunakan model ini karena variabel ataupun indikator yang dikemukakan oleh George Edward III merupakan variabel yang bisa menjelaskan secara komprehensif tentang kinerja implementasi dan dapat lebih kongkret dalam menjelaskan proses implementasi sebenarnya.

C. Swasembada Sapi

Swasembada daging sapi adalah kemampuan penyediaan daging produksi lokal sebesar 90-95% dari total kebutuhan daging sapi dalam negeri, sehingga impor sapi bakalan dan daging nantinya diharapkan hanya sekitar 5% (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Tengah 2017). Permintaan daging sapi diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, perbaikan ekonomi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan gizi, sehingga produksi daging sapi dan lainnya diusahakan terus ditingkatkan. Perkembangan populasi sapi potong di Propinsi Lampung dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, bahkan peningkatan tertinggi

terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 49,7% (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Tengah, 2017).

Kebutuhan daging di Propinsi Lampung dari sisi produksi sebenarnya telah dapat dipenuhi tetapi karena banyaknya permintaan ternak keluar Lampung (se-Sumatera) dengan harga yang lebih kompetitif maka saat ini Lampung sendiri kekurangan stock ternak untuk dipotong pada rumah potong.

D. Kesejahteraan Sosial

Menurut Adi (1994: 3) kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Menurut Friedlander dalam Adi (1994: 4) Kesejahteraan sosial merupakan system yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial, yang dirancang untuk membentuk individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan.

Pelayanan–pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian terhadap individu–individu, kelompok–kelompok, komunitas–komunitas dan kesatuan–kesatuan penduduk yang lebih luas. Hal ini merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan harus saling membantu, agar kehidupan ini berjalan selaras dan harmonis menciptakan suasana yang sejahtera. Tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan

mengacu kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas. Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu.

Menurut Mendoza dalam Adi (1994: 8) ada tiga tujuan utama yang terkait dengan kesejahteraan sosial: 1) Tujuan yang bersifat kemanusiaan dan keadilan sosial. Tujuan kesejahteraan sosial ini berakar dari gagasan ideal demokratik mengenai keadilan sosial, dan hal ini berasal dari keyakinan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. 2) Tujuan yang terkait dengan pengendalian sosial. Tujuan ini berdasarkan pemahaman bahwa kelompok yang tidak diuntungkan; kekurangan; ataupun tidak terpenuhi kebutuhannya dapat melakukan “serangan” (baik secara individu ataupun kelompok) terhadap masyarakat (terutama yang sudah mapan).

3) Tujuan yang terkait dengan pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi memprioritaskan pada program-program yang dirancang untuk meningkatkan produksi barang dan pelayanan yang dapat diberikan, ataupun berbagai sumber daya lain yang dapat memberikan sumbangan terhadap pembangunan ekonomi.

E. Kerangka Pikir

Implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Implementasi biasanya menunjukkan seluruh upaya untuk melakukan perubahan melalui sistem baru dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan dalam suatu kebijakan atau program. Berkaitan dengan penelitian adalah bagaimana implementasi kebijakan swasembada daging sapi di Lampung Tengah studi pada Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram. Adapun indikator implementasi kebijakan swasembada daging yang digunakan peneliti adalah: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi dan (4) Struktur Birokrasi.

Menurut Edward III dalam Agustino (2008: 149), implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration dan public policy*. Menurut Edward III dalam Agustino (2008: 149), Implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration dan public policy*. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Artinya dari proses implementasi kebijakan melalui empat indikator tersebut dapat diketahui apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan swasembada daging sapi. Edward menyebutkan bahwa empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan (Budi Winarno, 2008:174).

Permintaan daging sapi diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, perbaikan ekonomi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan gizi, sehingga produksi daging sapi dan lainnya diusahakan

terus ditingkatkan. Perkembangan populasi sapi potong di Provinsi Lampung dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Untuk itu di canakan swasembada daging sapi di Lampung Tengah.

Berdasarkan penjelasan bagan kerangka pikir peneliti, makadapat diketahui dalam penelitian ini peneliti mengungkapkan Implementasi kebijakan swasembada daging sapi di Lampung Tengah, dengan indikator sebagai berikut:

a. Komunikasi

- 1) Transmisi, penyampaian informasi tentang proses pelaksanaan program swasembada daging sapi di Desa Qurnia Mataram Lampung Tengah
- 2) Kejelasan, kejelasan penyampaian informasi tentang swasembada daging sapi di Desa Qurnia Mataram yaitu meliputi teknis pelaksanaan program, syarat dan ketentuan serta waktu pelaksanaan.
- 3) Konsistensi, konsistensi dalam melaksanakan swasembada sapi, yaitu tentang pelaksanaan penyuluhan swasembada daging sapi

b. Sumber Daya (*Resources*)

- 1) Staff, berkenaan dengan cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan Swasembada Daging Sapi di Desa Qurnia Mataram.
- 2) Informasi, informasi meliputi kegiatan dan penyuluhan rutin pada petani peternak dan petani sapi di Desa Qurnia Mataram.

- 3) Wewenang, kewenangan yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan Swasembada daging Sapi di Desa Qurnia Mataram.
- 4) Fasilitas, fasilitas yang dimiliki dalam melaksanakan program sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam melaksanakan swasembada daging sapi di Desa Qurnia Mataram.

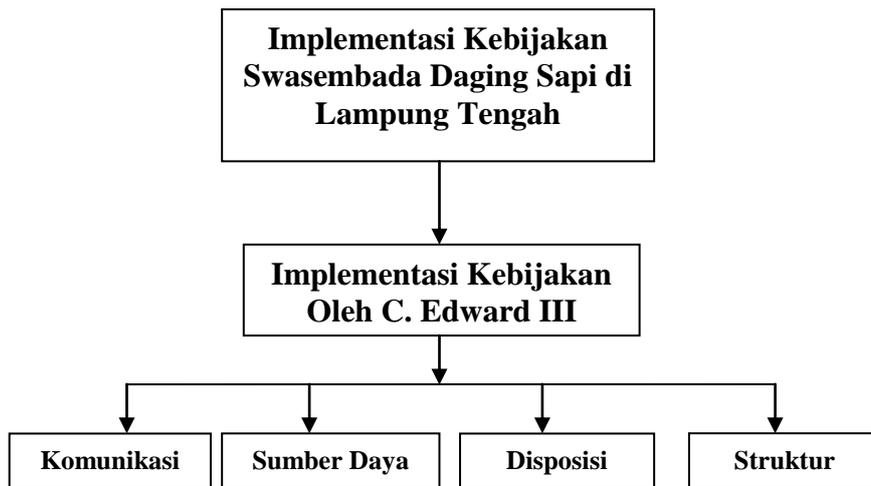
c. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan sikap positif pelaksanaan untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi tujuan dalam implementasi swasembada daging sapi di Desa Qurnia Mataram

d. Struktur birokrasi

- 1) Proses birokrasi yang digunakan dalam menjalankan kebijakan swasembada daging Sapi di Desa Qurnia Mataram.
- 2) Penyebaran tanggung jawab atas bidang kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi kewenangan, dan tanggung jawab dalam implementasi kebijakan swasembada daging sapi di Desa Qurnia Mataram.

Untuk memudahkan penelitian, maka penulis menggambarannya dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2013: 4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Argumen peneliti memilih penelitian ini karena penelitian kualitatif bersifat menyeluruh, dinamis, dan tidak mengeneralisasi.

Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian dalam melihat bagaimana implementasi kebijakan swasembada daging sapi di Lampung Tengah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan peternak sapi. Studi deskriptif kualitatif adalah suatu metode untuk menggambarkan suatu gejala-gejala sosial atau berusaha mendeskripsikan fenomena sosial tertentu secara terperinci.

B. Fokus Penelitian

Untuk mempertajam penelitian ini maka dalam penelitian kualitatif perlu menetapkan fokus. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial. Fokus penelitian pada dasarnya merupakan

masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya.

Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif sangat penting karena untuk membatasi studi dan mengarahkan pelaksanaan dan pengamatan. Pada masalah penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Oleh karena itu, peneliti memberikan pembatasan penelitian melalui fokus penelitian. Penelitian ini difokuskan kepada: menggambarkan dan menganalisa Implementasi Kebijakan Swasembada Daging Sapi di Lampung Tengah dengan model implementasi George C. Edward III. Indikator-indikator model tersebut adalah:

Implementasi kebijakan swasembada daging sapi di Lampung Tengah, dengan indikator sebagai berikut:

a. Komunikasi

- 1) Transmisi, penyampaian informasi tentang proses pelaksanaan swasembada daging sapi di Desa Qurnia Mataram Lampung Tengah
- 2) Kejelasan, kejelasan penyampaian informasi tentang swasembada daging sapi di Desa Qurnia Mataram yaitu meliputi teknis pelaksanaan program, syarat dan ketentuan serta waktu pelaksanaan.
- 3) Konsistensi, konsistensi dalam melaksanakan swasembada sapi, yaitu tentang pelaksanaan penyuluhan swasembada daging sapi.

b. Sumber Daya (*Resources*)

- 1) Staff, berkenaan dengan cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan Swasembada Daging Sapi di Desa Qurnia Mataram.
- 2) Informasi, informasi meliputi kegiatan dan penyuluhan rutin pada petani peternak dan petani sapi di Desa Qurnia Mataram.
- 3) Wewenang, kewenangan yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan Swasembada daging Sapi di Desa Qurnia Mataram.
- 4) Fasilitas, fasilitas yang dimiliki dalam melaksanakan program sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam melaksanakan swasembada daging sapi di Desa Qurnia Mataram.

c. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan sikap positif pelaksanaan untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi tujuan dalam implementasi swasembada daging sapi di Desa Qurnia Mataram.

d. Struktur Birokrasi

- 1) Proses birokrasi yang digunakan dalam menjalankan kebijakan swasembada daging Sapi di Desa Qurnia Mataram.
- 2) Penyebaran tanggung jawab atas bidang kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi kewenangan, dan tanggung jawab dalam implementasi kebijakan swasembada daging sapi di Desa Qurnia Mataram.

C. Lokasi Penelitian

Menurut Moleong (2013: 86), lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama sekali dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi, dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penelitian ini dilakukan di Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah.

Alasan Penulis memilih penelitian di Desa Qurnia Mataram karena Desa Qurnia Mataram merupakan sentra penggemukan secara kualitas yang terbaik di bandingkan dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Seputih Mataram. Selain di Desa Qurnia Mataram lokasi penelitian juga di lakukan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Tengah karena Dinas Peternakan ini merupakan instansi yang menangani Swasembada sapi di Provinsi Lampung khususnya di Lampung Tengah.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau obyek penelitian menurut Tresiana (2013: 86). Sumber data ditulis atau direkam. Wawancara dilakukan kepada informan yang dipilih, wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara

mengenai implementasi kebijakan swasembada daging sapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan peternak sapi di Desa Qurnia Mataram.

Tabel 5. Informan yang Diperoleh Peneliti

| No | Nama | Jabatan | Keterangan |
|----|-------------|-------------------------------|---|
| 1 | Andi Antoni | Kesehatan hewan | Dinas Peternakan Lampung Tengah |
| 2 | Yadi | Seksi pembibitan dan produksi | Dinas Peternakan Lampung Tengah |
| 3 | Prapto | Insminator | Doktor Hewan yg Bekerja sama dengan Dinas Peternakan Lampung Tengah |
| 4 | Teguh | Insminator | Doktor Hewan yang Bekerja sama dengan Dinas Peternakan Lampung Tengah |
| 5 | Andi Dirman | Peternak Sapi | Peternak Desa Qurnia Mataram |
| 6 | Sahrul | Peternak Sapi | Peternak Desa Qurnia Mataram |

Sumber: diolah Peneliti2018

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi dari data primer. Data sekunder merupakan sumber data tidak langsung memberikan data kepada peneliti atau misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen-dokumen menurut Sugiyono (2013: 225).

Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa berita surat kabar, artikel, website, serta referensi-referensi yang menjadi panduan penyusunan kebijakan Provinsi Lampung. Peraturan menteri pertanian nomor 19/PERMANTAN/OT.140/2/2010 tentang pedoman umum swasembada sapi Tahun 2014.

E. Informan

Informan yang ditentukan dalam penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling*. Alasan peneliti menggunakan penentuan informan secara *purposive sampling* karena peneliti meyakini bahwa informan yang dipilih adalah sebagai aktor dan kelompok sasaran dari kebijakan swasembada daging sapi. Sehingga menurut peneliti teknik *purposive sampling* sangat tepat untuk digunakan untuk penelitian mengenai implementasi kebijakan swasembada daging sapi di Lampung Tengah 2017 di Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram. Peneliti memfokuskan informan pada Dinas Peternakan Lampung Tengah khususnya kasi pembibitan, Prpto petugas lapangan (insminator) dan peternak sapi di Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013: 231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Pada penelitian ini peneliti harus dapat mengetahui tahap-tahap yang akan dilalui sebelum melakukan wawancara agar data yang diinginkan bisa tercapai sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan informan-informan mengenai implementasi swasembada daging sapi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan peternak sapi di Lampung Tengah di Desa Qurnia Mataram.

Masalah tentang swasembada: swasembada di lampung tengah sudah berjalan dan banyak program yang kami terapkan dalam swasembada di lampung tengah. Program-program swasembada di lampung tengah saat ini yang berjalan seperti halnya UPSUSWAB dari sini pemerintah membantu petani agar bisa mengembangkan calon bibit unggul agar bisa memenuhi kebutuhan daging di lampung tengah Cara menangani swasembada: dalam swasembada saat ini pemerintah bekerja sama dengan masyarakat agar bisa membangun swasembada di Lampung Tengah agar tercapainya kebutuhan daging di Lampung Tengah. Sehingga peneliti dapat menemukan data yang mendalam dengan mencatat dan mendengarkan keteranga dari informan. Berikut ini wawancara dengan informan :

- a. Andi Antoni selaku kasi bidang penyuluhan dan pelaksana swasembada upsuswab. Kebijakan pemerintah yang mengatur tentang swasembada di lampung tengah dalam upaya ini pemerintah dan dinas peternakan melakukan swasembada sapi agar mengurangi ekspor daging dan bakalan sapi dari luar negeri.
- b. Yadi kasi dibidang pembibitan. Dalam upaya penyediaan bahan bakalan atau indukan produktif dinas peternakan bekerjasama dengan para peternak sapi di lampung tengah agar mengurangi pemotongan indukan produktif agar bisa di jadikan ib (insminasi buatan). Pengurangan tersebut membantu adanya bahan atau bakalan sapi yang bisa untuk memenuhi daging di lampung tengah.
- c. Prapto isminator yang membantu masyarakat untuk memberikan penyuluhan dan mengobati hewan yang terkena penyakit di kandang tersebut. Permasalahan petani yaitu cukup kompleks dari bidang kesehatan dan yang di alami petani yaitu sulitnya membuat pakan atau bahahan makanan yang ada. Musim kemarau petani sangat sulit mendapatkan bahan makanan untuk hewanya.
- d. Sahrul peternak sapi yang memelihara dan merawat sapi yang ada di desa qurnia mataram. Petani yang memelihara sapi hingga gemuk atau sesuai permintaan pasar daging di lampung tengah. Petani mengalami banyak faktor kesulitan di musim kemarau terbatasnya pasokan baham makanan yang saat ini menggunakan bahan makanan yang buatan agar bisa mempercepat penggemukan pada hewan yang di pelihara.

e. Andy Diman peternak sapi di desa qurnia mataram keterbatasan stok bahan makanan pokok yang menjadi masalah bagi kami peternak sapi atau penggemukan sapi, dengan harga yang terlampau mahal kami sangat sulit untuk menjangkau harga karena keterbatasan modal. Kami hanya mengandalkan rumput dari tanaman yang kami tanam di pinggiran sawah kami agar bisa memenuhi makanan ternak kami. Bahan makanan yang biasa digunakan kulit ubi tetapi harganya sangat mahal dan susah di dapatkan.

2. Dokumentasi

Menurut Moleong (2013: 216) dokumen ialah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Maksud mengumpulkan dokumen ialah untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor di sekitar subyek penelitian. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dalam kata lain adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, dan arsip-arsip yang ada pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Tengah.

Tabel 6. Dokumen terkait Implementasi Swasembada Sapi

| No | Dokumentasi |
|----|--|
| 1 | Publikasi kegiatan kelompok tani terkait swasembada di Desa Qurnia Mataram |
| 2 | Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/2014 tentang pedoman Umum Swasembada Daging Sapi 2014, bahwa dalam angka memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri perlu upaya pencapaian swasembada daging sapi dan diperlukan suatu swasembada daging sapi. |

Sumber: diolah peneliti 2017

3. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan Moleong (2013: 211). Observasi yang digunakan adalah observasi tidak terstruktur karena pengamatan dilakukan ketika menemukan data-data di lapangan yang dibutuhkan (tanpa ditentukan terlebih dahulu). Adapun observasi yang peneliti lakukan yaitu mengamati secara langsung apa saja fasilitas yang ada di lapangan dalam pelaksanaan Swasembada daging sapi di Desa Qurnia Mataram.

Tabel 7. Objek Penelitian Program Swasembada Daging Di Lampung Tengah 2017

| No | Objek Penelitian | Tempat | Waktu |
|----|-------------------------|----------------|------------------|
| 1 | Fasilitas kandang sapi | Qurnia mataram | 3 September 2017 |
| 2 | Insminasi buatan | Qurnia mataram | 3 September 2017 |
| 3 | Mesin penghancur rumput | Qurnia mataram | 3 September 2017 |

G. Teknik Pengolahan Data

Abdurrahmat Fathoni (2011:112), adalah sebagai berikut :

1. Editing Data ialah pemeriksaan kembali data hasil penelitian yang tercantum pada kuisioner untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasan isi jawaban, kesesuaian antara jawaban yang satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban dengan pertanyaan dan keseragaman satuan data. Kesemuannya dilakukan untuk menghindari kekeliruan dalam proses analisis data.
2. Koding Data ialah mengklasifikasi data hasil penelitian yang tercantum dalam kuisioner dalam arti isian/jawaban yang maksudnya sama walaupun kalimatnya berbeda, diberi kode atau sandi – sandi tertentu yang sama lazimnya dengan memberikan jawaban yang diannngap sama.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman dalam Sugiyono, (2013: 246). Miles and Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan

secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian penulis dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan penelitian yakni implementasi kebijakan swasembada daging sapi di Lampung Tengah.

Peneliti wawancarai yaitu ketua yang memimpin jalannya swasembada di Lampung Tengah, kasi pembibitan selaku memenuhi kebutuhan bibit sapi, isminator selaku petugas lapangan yang memantau dan melihat kesehatan hewan pada kelompok tani, dan masyarakat yang melakukan swasembada pada Desa Qurnia Mataram Lampung Tengah.

2. Penyajian Data

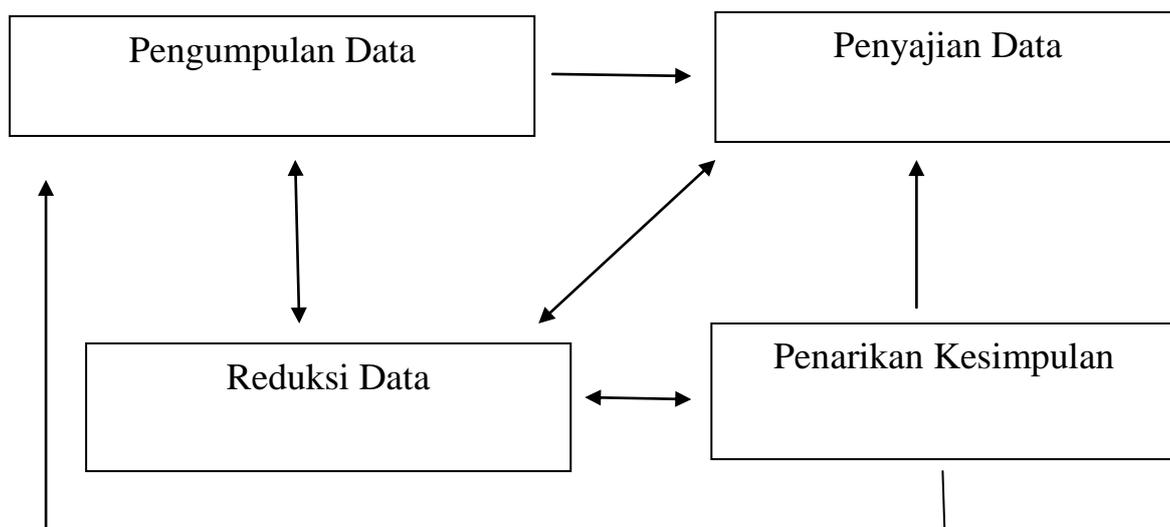
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran serta keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, bagan, foto, dan gambar.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu dengan melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal penelitian dan selama proses pengumpulan data yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan inti sari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang mendeskripsikan konsep implementasi kebijakan swasembada daging sapi di Qurnia Mataram.

Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan inti sari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang mendeskripsikan konsep implementasi program swasembada daging sapi di Desa Qurnia Mataram Lampung Tengah. Berikut ini merupakan gambaran model interaktif yang diajukan Miles dan Huberman:



Gambar 2. Bagan Interaktif

I. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik keabsahan data triangulasi yakni triangulasi sumber. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainnya. Menurut Denzin dalam Moleong (2013: 330) ada empat macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik, dan teori.

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa teknik pengumpulan data, dan sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi penyidik, dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dalam melakukan penelitian ini.

Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data

a. Triangulasi

Menurut Moleong (2013: 330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainnya. Menurut Denzin dalam Moleong (2013: 330) ada empat macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa teknik pengumpulan data, dan sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi penyidik, dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain. Berikut ini adalah contoh tabel triangulasi dalam implementasi program swasembada daging sapi di Desa Qurnia Mataram .

Tabel 8. Contoh Tabel Triangulasi Implementasi Program Swasembada Daging Sapi Di Provinsi Lampung

| NO | Informan | Wawancara | Observasi | Dokumentasi | Keterangan |
|----|--|---|--|---|--|
| 1 | Bapak Yadi Selaku Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi | Sistem Penyampaian informasi mengenai program penggemukan sapi ini yaitu kita mengundang dinas dari kabupaten lalu kita mengadakan musrembang | Proses penyampaian informasi program penggemukan sapi dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Tengah kepada para peternak. |  | Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui indikator transmisi pada implementasi kebijakan program swasembada |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | dan mensosialisasikan program ini lalu memberikan uraian tugas dan tanggung jawab sesuai keputusan yang di tetapkan” | | | daging sapi berjalan dengan cukup baik, karena informasi sudah tepat sasaran. |
|--|--|--|--|--|---|

Sumber: Tabel di Olah Peneliti 2018

b. Kecukupan Referensial

Kecukupan referensial yaitu, dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis dan penafsiran data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku tentang kebijakan publik dan penggemukan sapi, buku statistik peternakan tahun 2014, pedoman pelaksanaan penguatan pakan sapi potong penggemukan tahun 2015, catatan penelitian, dokumentasi foto-foto dan rekaman wawancara penelitian di lapangan.

c. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitass dalam penelitian yang nonkualitatif. Uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan

data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti selalu mendiskusikannya dengan dosen pembimbing.

d. Kepastian Data

Pengujian kepastian dalam penelitian kualitatif hampir sama dengan uji kebergantungan, sehingga pengujiannya dilakukan peneliti dengan mendiskusikannya kepada dosen pembimbing dan dosen pembahas. Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian yang sudah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar kepastian.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Desa Qurnia Mataram

Desa Qurnia Mataram adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Desa Qurnia Mataram saat ini terdiri dari 8 Dusun dan 41 RT. Jarak Desa Qurnia Mataram ke Kecamatan Seputih Mataram berjarak 3 Km dan Jarak Desa Qurnia Mataram ke Ibukota Provinsi Lampung berjarak 80 Km. Luas Desa Qurnia Mataram adalah 400,5 Ha. Total jumlah penduduk di Desa Qurnia Mataram mencapai 8.539 jiwa (1732 Kepala Keluarga) dengan rincian, laki-laki sebanyak 4.342 jiwa dan perempuan 4.179 jiwa.

1. Situasi dan Kondisi Desa Kejadian

a. Luas wilayah Desa Qurnia Mataram Kec. Seputih Mataram :

1. Luas wilayah : 400,15 hektar

2. Pembagian Wilayah

3. Jumlah Dusun : 8 Dusun

4. Jumlah RT : 41 RT

a. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Desa trimulyo

b. Sebelah Selatan Berbatasa Dengan Desa fajar Mataram

c. Sebelah Barat Berbatasan Kelurahan Badar Rejo

d. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Desa Rejo Sari Mataram

b. Topografi dan Iklim

Sebagian besar Desa Qurnia Mataram merupakan daratan rendah dengan ketinggian berkisar antara 0-750 m di atas permukaan laut, dengan suhu berkisar antara 20-28°C yang dicirikan dengan bulan basah selama enam bulan Desember sampai bulan Juni dan bulan kering pada bulan Juli sampai dengan November pada setiap tahunnya dengan kelembaban udara berkisar antara 80-88% dan curah hujan rata-rata 2500-3000 mm/tahun.

2. Penggunaan Lahan

Desa Qurnia Mataram memiliki luas 930 ha. Hampir sebagian besar luas yang ada di Desa Qurnia Mataram digunakan untuk lahan pertanian. Adapun luas Desa Qurnia Mataram menurut penggunaan lahannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaannya di Desa Qurnia Mataram tahun 2017

| No. | Jenis Penggunaan | Luas (ha) | Presentase |
|-----|----------------------|-----------|------------|
| 1. | Sawah Irigasi Teknis | 679,5 | 73,07 |
| 2. | Sawah Tadah Hujan | 10,0 | 1,07 |
| 3. | Tanah Kering | | |
| | d. Pekarangan | 205,0 | 22,04 |
| | e. Peladangan | 10,0 | 1,07 |
| | f. Lain-lain | 25,0 | 2,69 |
| 4. | Perikanan | 0,5 | 0,06 |
| 5. | Perkebunan | 0 | 0 |
| 6. | Rawa-rawa | 0 | 0 |
| | Jumlah | 930,0 | 100,00 |

Sumber: Monografi Desa Qurnia Mataram Tahun 2017

Tabel 8 diatas menunjukkan luas lahan di Desa Qurnia Mataram terdapat lahan pekarangan yang cukup luas yaitu 205 ha. Luasnya lahan

pekarangan ini menunjukkan bahwa Desa Qurnia Mataram merupakan daerah yang baik untuk usaha penggemukan sapi karena banyaknya luas lahan pekarangan yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat pembuatan kandang ternak sapi dalam usaha penggemukan sapi. Selain itu lahan pekarangan ini juga dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman hijauan sebagai pakan ternak sapi.

3. Keadaan Penduduk

Desa Qurnia Mataram pada tahun 2009 mempunyai jumlah penduduk 8.539 jiwa (1.732 KK). Terdiri dari penduduk laki-laki 4.342 jiwa dan perempuan 4.197 jiwa yang tersebar di 8 dusun. Distribusi penduduk Desa Qurnia Mataram berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 10. Distribusi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia di Desa Qurnia Mataram Tahun 2017

| Kelompok Usia (tahun) | Keterangan | Jumlah (orang) | Presentasi |
|-----------------------|---------------|----------------|------------|
| <15 | Belum bekerja | 3.223 | 37,85 |
| 15-64 | Usia Kerja | 5.089 | 59,60 |
| ≥64 | Tidak bekerja | 217 | 2,44 |
| Jumlah | | 8.539 | 100.00 |

Sumber: Monografi Desa Qurnia Mataram Tahun 2017

Tabel 9 menunjukkan bahwa penduduk di Desa Qurnia Mataram sebagian besar termasuk dalam kelompok usia produktif yaitu berjumlah 5.089 orang. Penduduk usia yang produktif di Desa Qurnia Mataram cukup besar

mampu menyediakan tenaga kerja disektor peternakan terutama dalam penggemukan sapi.

a. Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan formal, Desa Qurnia Mataram memiliki jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 11. Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Qurnia Mataram Tahun 2017

| No | Indikator | Sub Indikator | Jumlah Penduduk (orang) |
|----|---|---|-------------------------|
| 1 | Tingkat pendidikan penduduk usia > 15 Tahun | Jumlah penduduk buta huruf | 178 |
| | | Jumlah penduduk tidak tamat SD | 754 |
| | | Jumlah penduduk tidak tamat SD | 1.011 |
| | | Jumlah penduduk tamat SMP | 1.791 |
| | | Jumlah penduduk tamat SMA | 1.257 |
| | | Jumlah penduduk tamat D1 | 67 |
| | | Jumlah penduduk tamat D2 | 38 |
| | | Jumlah penduduk tamat D3 | 86 |
| | | Jumlah penduduk tamat S1 | 112 |
| | | Jumlah penduduk tamat S2 | 12 |
| | | Jumlah penduduk tamat S3 | 0 |
| 2 | Wajib belajar 9 tahun dan angka putus sekolah | Jumlah penduduk usia 7-15 tahun masih sekolah | 1.064 |
| | | Jumlah penduduk usia 7-15 tahun putus sekolah | 1.252 |

Sumber: Monografi Desa Qurnia Mataram Tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk di Desa Qurnia Mataram yang tamat pendidikan Sekolah Menengah Pertama berjumlah paling besar yaitu 1.791 (20,79%) orang. Hal ini harus diperbaiki, agar di masa yang akan datang banyak penduduk yang berpendidikan tinggi, sehingga taraf

kehidupan dan si stem berfikir akan lebih baik dan akan berdampak pada pencapaian tujuan yang diinginkan oleh penduduk di Desa Qurnia Mataram, termasuk kemajuan di bidang usaha penggemukan sapi.

b. Keadaan penduduk menurut mata pencaharian

Sebagian besar penduduk di Desa Qurnia Mataram memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja pada bidang pertanian dan peternakan, selebihnya bekerja pada industri rumah tangga, perdagangan dan jasa, Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI, dan lain-lain. Distribusi penduduk berdasarkan matapencaharian di Desa Qurnia Mataram dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Keadaan Penduduk Desa Qurnia Mataram Berdasarkan Matapencaharian Tahun 2017

| Jenis Pekerjaan | Jumlah KK | Presentase |
|-------------------------------|-----------|------------|
| Pertanian dan Peternakan | 1.450 | 83,71 |
| Perdagangan dan Jasa | 157 | 9,04 |
| Pegawai negri Sipil/TNI/POLRI | 75 | 4,33 |
| Industri Rumah Tangga | 27 | 1,55 |
| Lain-lain | 23 | 1,32 |
| Jumlah | 1.732 | 100,00 |

Sumber: Monografi Desa Qurnia Mataram Tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa 83,71% atau sebanyak 1.450 kepala keluarga (KK) dari 1.732 kepala keluarga berprofesi sebagai petani, baik sebagai petani padi sawah maupun sebagai petani peternak sapi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar penduduk di Desa Qurnia Mataram bermatapencaharian sebagai petani.

4. Sarana dan Prasarana

Pembangunan sarana dan prasarana sangat penting untuk menunjang pembangunan suatu daerah guna meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Sarana dan prasarana yang ada di Desa Qurnia Mataram diperoleh dari swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah. Sarana dan prasarana yang dimiliki Desa Qurnia Mataram dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Sarana dan Prasarana di Desa Qurnia Mataram Tahun 2017

| No | Sarana/Prasarana | Jenis | Jumlah (unit) |
|----|---------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | Kemasyarakatan | Balai desa | 1 |
| | | Kantor desa | 1 |
| 2 | Sarana Pendidikan | Taman Kanak-kanak | 1 |
| | | Sekolah Dasar | 2 |
| | | Sekolah Menengah Pertama | 2 |
| 3 | Sarana Kesehatan | Posyandu | 1 |
| | | Puskesmas | 1 |
| 4 | Sarana Olahraga | Lapangan Bola | 3 |
| | | Lapangan Voli | 4 |
| 5 | Sarana Sosial | Pasar Tradisional | 1 |
| | | Rumah Ibadah | 4 |
| 6 | Sarana Transportasi | Mikrolet | 5 |
| | | Becak | 8 |
| | | Gerobak | 7 |

Sumber: Monografi Desa Qurnia Mataram tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan Desa Qurnia Mataram memiliki balai desa yang digunakan untuk kegiatan desa diantaranya pertemuan anggota kelompok tani dengan penyuluh pertanian. Selain itu Desa Qurnia Mataram juga memiliki keadaan jalan baik karena sudah beraspal maka peternak akan lebih mudah mendapatkan sarana produksi yang dibutuhkan dalam usaha penggemukan sapi.

5. Potensi Desa

Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat hidup lebih sejahtera, dan terdapat di sekitar alam lingkungan hidup kita. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya.

Desa Qurnia Mataram memiliki beberapa potensi sumber daya alam dari berbagai bidang diantaranya peternakan pertanian, dan perkebunan. Dalam bidang pertanian terdapat beberapa komoditas tanaman yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu tanaman-tanaman pangan seperti Singkong, jagung dan hasil perkebunan yaitu karet dan sawit. Sedangkan matapecaharian utama yang sangat populer di Desa Qurnia Mataram berasal dari bidang peternakan dan penggumakan sapi karena menghasilkan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Namun karena jumlah pemenuhan daging sapi yang kurang memadai potensi di Desa Qurnia Mataram sebagai pengasil ternak dan penggemukan sapi perlu dilakukan peningkatan dengan program swasembada sapi oleh pemerintah.

6. Wilayah Peternakan dan Penggemukan Sapi

Desa Qurnia Mataram merupakan sentra penggemukan sapi secara kualitas yang terbaik di bandingkan dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Seputih Mataram. Seperempat dari jumlah penduduk Desa Qurnia Mataram Merupakan peternak sapi lokal bahkan sapi yang berasal dari Desa Qurnia Mataram diakui secara nasional sebagai sapi dengan kualitas

nomor satu di Indonesia. Namun terkadang para peternak Desa Qurnia Mataram yang mayoritas adalah penduduk dengan ekonomi rendah terkendala oleh biaya dalam pemberian pangan yang dirasa cukup tinggi harganya. Sehingga pemerintah dirasa perlu memberikan perhatian terhadap implementasi swasembada sapi nasional untuk meningkatkan kualitas daging sapi nasional khususnya pada Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah sebagai sentra penggemukan Sapi di Provinsi Lampung.

7. Kegiatan Swasembada Daging di Lampung Tengah

Di Lampung Tengah sebagai sentra penggemukan sapi yang terbesar melakukan swasembada untuk menanggulangi kurangnya pasokan daging di Provinsi Lampung. Lampung Tengah juga menjadi tolak ukur dalam bidang swasembada untuk provinsi Lampung dan provinsi yang ada di Indonesia, Lampung Tengah itu sendiri saat ini tengah menjalankan program swasembada daging dari pemerintah dan menjadi proyek utama adalah penyelamatan indukan produktif atau mengurangi pemotongan indukan produktif. Dari data yang di ambil peneliti berikut ini data sapi yg berada di Lampung Tengah studi pada desa Qurnia Mataram Lampung Tengah

Tabel 14. Data Populasi Sapi di Desa Qurnia Mataram

| No | Desa | Jumlah |
|----|----------------------|--------|
| 1 | Banjar Agung Mataram | - |
| 2 | Wirata Agung Mataram | 15 |
| 3 | Varia Agung | 71 |
| 4 | Utama Jaya Mataram | 22 |
| 5 | Qurnia Mataram | 132 |
| 6 | Dharma Agung Mataram | 7 |
| 7 | Trimulyo Mataram | 31 |
| 8 | Sumber Agung Mataram | 35 |
| 9 | Subing Karya | 5 |
| 10 | Rejosari Mataram | 110 |
| 11 | Fajar mataram | 189 |
| 12 | Bumi Setia | 50 |

Dari data yang ada peneliti menyimpulkan bahwasanya di Desa Qurnia Mataram yang banyak melakukan swasembada daging dan penyuntikan insminasi buatan. Di Desa Qurnia Mataram juga memiliki lahan yang cukup luas untuk para petani agar bisa menanam rumput sebagai pengganti pakan ternak yang saat ini sulit untuk didapat oleh para peternak sapi di Lampung Tengah.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan Program Penggemukan Sapi di Desa Qurnia Mataram dapat disimpulkan dari aspek-aspek berikut ini:

1) Komunikasi:

- a. Transmisi, penyampaian program pemerintah telah dilakukan, dari gencarnya sosialisasi pembinaan terhadap para peternak yang kelompok peternak desa Qurnia Mataram.. Penyampaian informasi dilakukan untuk memberi tahu peternak sapi agar peternak melakukan swasembada di desa Qurnia Mataram.
- b. Kejelasan, dinas peternakan sebagai penyalur dan penanggung jawab pada tingkat kabupaten, kecamatan dan desa telah memberikan uraian tugas. Kejelasan dari dinas dilakukan penyuluhan terhadap peternak sapi agar peternak sapi melakukan upaya swasembada daging, terutama di Desa Qurnia Mataram.
- c. Konsistensi, Pengawasan pemerintah melakukan pengawasan atau monitoring program secara langsung terhadap swasembada ini dilakukan oleh insminator dan dinas peternakan.

- 2) Sumber Daya:
 - a. Sumber Daya Manusia, Implementasi Program Penggemukan Sapi peternak minim pengetahuan yang dimiliki sebagai pelaksana program penggemukan sapi dan juga teknisi perbaikan alat kerja, oleh sebab itu hal ini terus menerus menjadi perhatian perbaikan dan pembinaan oleh pemerintah.
 - b. Informasi, kejelasan informasi mengenai tugas-tugas dan fungsi para aparat pelaksana dan tentang koordinasi antara penanggung jawab program dan pelaksanaannya sudah berjalan baik, karena para kelompok peternak telah mengetahui akan program penggemukan sapi ini untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
 - c. Wewenang, kewenangan pada pelaksanaan program penggemukan sapi berjalan dengan baik, terlihat dari kewenangan implementasi yaitu para pengurus dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dan para kelompok peternak sebagai pelaksana program melaksanakan kewenangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
 - d. Fasilitas, pemerintah telah memfasilitasi IB (inseminasi buatan) secara gratis untuk para peternak sapi untuk melindungi pemotongan indukan yang produktif agar bisa di kembangkan dan menghasilkan anakan sapi lokal.
- 3) Disposisi, Dinas Peternakan Lampung Tengah rutin melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah

ada. Pelaksana program tanggap akan keluhan peternak sapi di desa qurnia mataram yang menjadi fokus swasembada tersebut.

- 4) Birokrasi, Pada aspek struktur birokrasi terdapat dua variabel yaitu SOP dan fragmentasi yang sudah berjalan dengan baik. SOP dan fragmentasi sudah tercantum pada buku pedoman pelaksanaan program swasembada daging sapi serta seluruh pelaksana sudah mengerti uraian tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan.

2. Faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan swasembada daging sapi di Lampung Tengah studi pada Desa Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram

1) Ketersediaan Pakan

Terjadinya persaingan penggunaan lahan akibat penambahan penduduk menyebabkan lahan penggembalaan terkonversi menjadi area pertanian atau lahan untuk pemukiman, dan pembangunan subsector lainnya, sehingga produksi hijauan terbatas dan daya tampung padang penggembalaan tidak lagi seimbang dengan kebutuhan persatuan ternak.

2) Ketersediaan Bibit

Sumber utama daging sapi bagi konsumsi nasional masih tergantung pada usaha pembibitan dalam negeri yang berupa peternakan rakyat, Namun di daerah sentra produksi pertanian usaha pembibitan menurun karena berkurangnya permintaan tenaga kerja ternak.

3) Permasalahan Teknis Budi Daya dan Sosio- Budaya

Rendahnya produktivitas sapi local karena manajemen pemeliharaan belum efisien dan tingkat kematian ternak yang tinggi, terutama akibat kekurangan pakan pada musim kemarau.

4) Tingginya Pemotongan Betina Produktif

Tingginya intensitas pemotongan sapi betina bunting yaitu sebanyak 95,1% dengan indicator ditemukannya embrio atau janin pada uterus (rahim) sapi, secara nasional diperkirakan sekitar 150-200 ribu ekor sapi betina produktif dipotong setiap tahunnya. Jumlah ini sangat besar dan dapat mengganggu populasi dan produksi daging yang berasal dari sapi lokal.

5) Ketimpangan Distribusi Pasokan Sapi dan Daging Sapi

Penyediaan daging terkendala dengan masalah transportasi antar pulau dan sebagainya. Selain biayanya mahal, distribusi sapi juga tidak mudah dilakukan.

6) kurangnya sumber daya manusia yang ditugaskan dari dinas untuk bekerja mengontrol sapi di lokasi yang melakukan swasembada (Insminator).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Manajemen Ketersediaan Pakan, yang dapat dilakukan dengan cara menempatkan lokasi penggemukan di daerah sentra produksi tanaman

pangan dan sayuran dengan mengadopsi system usaha tani tanaman dan ternak secara terpadu dan terintegrasi

2. Pengembangan Usaha Pembibitan Sapi, Tulang punggung peternakan sapi potong di Indonesia adalah peternak sapi rakyat. Oleh karena itu, dalam program pembibitan sapi potong pemerintah harus memprioritaskan pengembangan sapi potong kepada peternak sapi rakyat.
3. Pengendalian Pemotongan Sapi Betina Produktif, mencegah pemotongan sapibetina produktif harus dilakukan dengan berbagai pendekatan, agar bisa meningkatkan produktivitas sapi potong.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Dinham, Adam. 2009. *Faith, Public Policy and Civil Society: Problems, Policies, Controversies*. London: Palgrave Macmillan.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Neuman, W Laurence. 2007. *Basic of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson Education Limited.
- Neuman, W Laurence. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson Education Limited.
- Santana, Septiyawan. 2007. *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suharno. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sugeng Y. Bambang. 2004. *Sapi Potong*. PT. Penebar Swadaya. Jakarta
- Suryana, 2008. *Pengembangan Usaha Ternak Sapi Potong Berorientasi Agribisnis Dengan Pola Kemitraan*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan.
- Sulistio, Eko Budi. 2013. *Kebijakan Publik (Public Policy)*, Buku Ajar Kebijakan Publik. Bandar Lampung. FISP Univeristas Lampung.
- Wahab, Solichin Wahab. 2008. *Pengantar Kebijakan Publik*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah. Malang
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.

Fatoni,abdurahman, 2011. *Metode Penelitian & teknik penyusunan skripsi*.
Jakarta: rineka cipta

Jurnal :

Chairul dan Tjetjep *Kebijakan Pengembangan Ternak Sapi Potong Di Wilayah
Sentra Produksi Berbasis Tanaman Pangan Di Indonesia 2010*

Dwiyanto *Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Dan Inovasi Teknologi Dalam
Mendukung Pengembangan Sapi Potong Di Indonesia, 2008*

Sumber Lain:

www.kementan.go.id/berita.html diakses pada (2 September 2017)

www.lampost.com diakses pada tanggal (2 September 2017)

www.disnakkeswan.lampungprov.go.id (diakses pada 1 September 2017)

www.ditjennak.pertanian.go.id (diakses pada 1 September 2017)

www.agronomers.com/2014 (di akses pada 1 september 2017)

Pra Riset Dinas Peternakan Lampung Tengah (5 September 2017)

Pra Riset Dinas Peternakan Lmpung Tengah (25 September 2017)

kemensos.go.id/berita (di akses pada 1 September 2017)

www.agronomers.com, (diakses pada 1 September 2017)